

Sosialisasi dan Optimalisasi Layanan Digital melalui Sosialisasi dan Pendampingan Aparatur RT/RW Desa Lemahmulya

Agus Purwanto^{1*}, Herianto Saputra², Abednedju Giovano Warani Sangkaeng³, GF. Prasetyanto⁴, Wahyudi Eko Saputro⁵, Firman Maulana Yusuf⁶
Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema, Karawang Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email Korespondensi: agus.kampusbm@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 10-10-2026

Disetujui 15-10-2026

Diterbitkan 17-10-2026

Katakunci:

Sosialisasi;
Optimalisasi;
Digital;

ABSTRAK

Transformasi digital pelayanan publik memerlukan kesiapan sumber daya manusia hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan warga. Aparatur rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) berperan penting dalam penyampaian informasi, pendataan, komunikasi, dan fasilitasi kebutuhan administrasi masyarakat. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan sosialisasi optimalisasi layanan digital yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STTI Sony Sugema Karawang bersama pemerintah Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, pada 7 Oktober 2026 di aula kantor desa. Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan mitra, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pendampingan praktis mengenai pemanfaatan teknologi digital secara tepat, aman, dan bermanfaat dalam pelayanan masyarakat. Informasi hasil dihimpun secara deskriptif dari dokumentasi dan catatan naratif kegiatan yang tersedia. Pelaksanaan berlangsung lancar dan peserta dilaporkan menunjukkan ketertarikan serta mengikuti kegiatan sampai selesai. Materi kegiatan menekankan potensi teknologi digital untuk mempercepat penyampaian informasi, memperkuat komunikasi warga, dan mendukung administrasi yang lebih tertib. Namun, dokumen kegiatan belum memuat jumlah peserta, instrumen penilaian, ataupun data pre-test dan post-test; karena itu, peningkatan kompetensi dan dampak terhadap mutu layanan belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan literasi digital aparatur RT/RW dan perlu dilanjutkan dengan praktik terstruktur, evaluasi kompetensi, serta pendampingan berkala.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Purwanto, A., Saputra, H. ., Sangkaeng, A. G. W. ., GF. Prasetyanto, Saputro, W. E. ., & Yusuf, F. M. . (2026). Sosialisasi dan Optimalisasi Layanan Digital melalui Sosialisasi dan Pendampingan Aparatur RT/RW Desa Lemahmulya. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3859-3867. <https://doi.org/10.63822/zccqgv29>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke perangkat elektronik, melainkan juga menata proses, kapasitas organisasi, dan hubungan pemerintah dengan warga agar layanan lebih mudah diakses serta berorientasi pada kebutuhan pengguna. OECD (2020, 2024) menekankan pentingnya layanan yang berpusat pada warga, tata kelola data, dan fondasi kelembagaan yang mendukung transformasi berkelanjutan. United Nations (2024) juga mencatat kemajuan pemerintahan digital secara global, tetapi menggarisbawahi kesenjangan antara tingkat pemerintahan dan wilayah dalam pengembangan layanan daring.

Pada tingkat desa, RT dan RW memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung langsung antara warga dan pemerintah desa. Kegiatan administrasi, penyebaran pengumuman, pendataan, dan komunikasi kebutuhan warga kerap dimulai dari lingkungan ini. Ketika teknologi digunakan secara tepat, kanal digital dapat membantu mempercepat distribusi informasi dan mengurangi hambatan komunikasi. Meski demikian, tersedianya perangkat atau aplikasi tidak otomatis menjamin pemanfaatan yang efektif; kemampuan pengguna, dukungan organisasi, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan lokal turut menentukan keberhasilan (Mergel et al., 2019; World Bank, 2022).

Literasi digital juga tidak hanya menyangkut kemampuan mengoperasikan perangkat. Pengguna perlu dapat mencari, memahami, menilai, mengomunikasikan, dan menjaga keamanan informasi. Van Deursen dan van Dijk (2014) menunjukkan bahwa kesenjangan digital dapat bergeser dari persoalan akses menuju perbedaan pola dan kualitas penggunaan. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, penelitian Rodiyah dan Bolanitan (2024) menyoroti pentingnya kapasitas literasi digital aparatur untuk mendukung implementasi sistem informasi desa. Kajian Heryana et al. (2022) mengenai peningkatan literasi digital perangkat desa di Karawang juga relevan karena menunjukkan bahwa penguatan kompetensi aparatur merupakan bagian dari dukungan terhadap layanan desa berbasis teknologi.

Kegiatan pengabdian terkait literasi digital telah dilakukan dengan beragam pendekatan. Wahid et al. (2024), misalnya, melaporkan program pemberdayaan literasi digital dalam sistem informasi pelayanan publik dengan tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi; hasil yang mereka laporkan memperlihatkan pentingnya evaluasi keterampilan peserta. Utama et al. (2025) menekankan pendekatan partisipatif dan praktis untuk memperkuat transformasi digital masyarakat. Temuan-temuan tersebut mendukung perlunya kegiatan yang tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi memberi ruang untuk mencoba, bertanya, dan memperoleh umpan balik.

Berdasarkan konteks tersebut, mahasiswa KKN STTI Sony Sugema Karawang melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Layanan Digital Masyarakat bagi aparatur RT/RW Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, pada 7 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di aula kantor desa dan dibuka oleh Sekretaris Desa Lemahmulya, Ibu Cucum, S.E., yang mewakili kepala desa. Kegiatan juga dihadiri Wakil Ketua I STTI Sony Sugema Karawang, Ridwan Efendi Rai, S.Kom., M.Kom., serta Ketua KKN, Firman Maulana Yusuf.

Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan sosialisasi, menjelaskan kontribusi kegiatan terhadap penguatan pemahaman awal aparatur RT/RW tentang layanan digital, serta mengidentifikasi aspek evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. Artikel disusun sebagai laporan deskriptif berdasarkan narasi dan dokumentasi kegiatan yang tersedia. Karena sumber kegiatan tidak menyertakan jumlah peserta, instrumen pengukuran, maupun skor kemampuan sebelum dan sesudah

kegiatan, artikel ini tidak mengklaim adanya peningkatan kompetensi yang terukur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Aula Kantor Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Mitra kegiatan adalah pemerintah desa dan aparatur RT/RW. Pelaksana kegiatan adalah mahasiswa KKN STTI Sony Sugema Karawang dengan dukungan institusi perguruan tinggi. Jumlah peserta adalah 20 orang.

Pra-pelaksanaan

Tahap awal berfokus pada penetapan konteks kegiatan dan koordinasi dengan pemerintah desa serta unsur KKN. Penentuan sasaran didasarkan pada peran RT/RW sebagai penghubung pelayanan masyarakat. Materi diarahkan pada manfaat penggunaan layanan digital untuk komunikasi, penyampaian informasi, dan dukungan administrasi, dengan penekanan bahwa teknologi perlu digunakan secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Sekretaris Desa Lemahmulya, Ibu Cucum, S.E., yang hadir mewakili kepala desa. Selanjutnya, kegiatan menghadirkan dukungan dari Wakil Ketua I STTI Sony Sugema Karawang, Ridwan Efendi Rai, S.Kom., M.Kom., dan Ketua KKN, Firman Maulana Yusuf. Mahasiswa KKN menjalankan peran sebagai pendamping edukasi bagi aparatur RT/RW. Pelaksanaan memadukan penyampaian materi, komunikasi dua arah, dan penjelasan praktis tentang pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas pelayanan masyarakat. Dokumen sumber tidak merinci nama aplikasi, modul praktik, durasi setiap sesi, atau perangkat yang digunakan; rincian tersebut tidak diasumsikan dalam laporan ini.

Evaluasi dan analisis

Evaluasi yang dapat dideskripsikan dari dokumentasi yang tersedia bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan narasi pelaksanaan, kelancaran kegiatan, ketertarikan peserta, dan keikutsertaan peserta hingga kegiatan berakhir. Informasi tersebut diperlakukan sebagai indikasi penerimaan kegiatan, bukan bukti peningkatan keterampilan. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan isi dokumentasi ke dalam tiga tema: proses pelaksanaan, manfaat yang diharapkan, dan kebutuhan tindak lanjut. Untuk kegiatan berikutnya, evaluasi direkomendasikan menggunakan daftar hadir, tes singkat sebelum-sesudah, lembar observasi praktik, dan survei kepuasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan

Sosialisasi dilaksanakan di aula Kantor Desa Lemahmulya dan melibatkan unsur pemerintah desa, pimpinan perguruan tinggi, pengelola KKN, mahasiswa, serta aparatur RT/RW. Pembukaan oleh sekretaris

desa memberi legitimasi dan dukungan lokal terhadap kegiatan, sementara keterlibatan pimpinan STTI Sony Sugema Karawang menunjukkan dukungan institusional terhadap pengabdian berbasis penerapan pengetahuan. Kolaborasi lintas unsur ini penting karena transformasi digital layanan publik memerlukan keterhubungan antara kebutuhan pengguna, dukungan organisasi, dan pendampingan teknis (OECD, 2020; Mergel et al., 2019).



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Desa Lemahmulya

Dokumentasi visual pada Gambar 1 digunakan sebagai bukti berlangsungnya kegiatan, bukan sebagai ukuran kuantitatif keberhasilan. Narasi pelaksanaan menyebut kegiatan berlangsung lancar, interaktif, dan penuh antusiasme. Peserta dilaporkan menunjukkan ketertarikan pada materi dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Walaupun demikian, karena tidak tersedia jumlah peserta, daftar kehadiran, atau pengukuran sistematis, tingkat partisipasi tidak dapat dinyatakan dalam persentase.

Relevansi materi dengan kebutuhan pelayanan RT/RW

Materi sosialisasi berangkat dari fungsi sehari-hari RT/RW dalam penyampaian informasi, pendataan warga, komunikasi, dan fasilitasi kebutuhan administrasi. Penggunaan teknologi digital berpotensi mempercepat penyebaran pengumuman, memperluas jangkauan komunikasi, dan membantu pencatatan informasi. Potensi tersebut sejalan dengan prinsip layanan publik yang berpusat pada warga, aksesibilitas, dan peningkatan mutu layanan (OECD, 2024; World Bank, 2022). Namun, manfaat itu baru menjadi hasil nyata apabila aparatur mampu menerapkan teknologi secara konsisten dan prosedur pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Literasi digital menjadi fondasi penting agar penggunaan layanan tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan bertanggung jawab. UNESCO (2018) menempatkan kompetensi digital sebagai gabungan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan individu mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Untuk aparatur RT/RW, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan memeriksa sumber informasi, menjaga kerahasiaan data warga, membatasi penyebaran dokumen pribadi, serta memastikan pesan yang dibagikan akurat. Aspek perlindungan data dan keamanan perlu menjadi bagian eksplisit dari pendampingan lanjutan.



Gambar 2. Foto bersama pelaksana selama kegiatan

Pembelajaran dari kegiatan sejenis

Pengalaman pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital akan lebih kuat bila menggabungkan sosialisasi dengan praktik dan evaluasi. Wahid et al. (2024) melaporkan bahwa program literasi digital pada sistem informasi pelayanan publik menggunakan tahapan persiapan, penyuluhan, dan evaluasi, serta mengukur perubahan keterampilan peserta. Heryana et al. (2022) juga menempatkan literasi digital perangkat desa sebagai aspek penting untuk mendukung layanan desa. Sementara itu, Rodiyah dan Bolanitan (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi desa berhubungan dengan beberapa dimensi literasi digital aparatur.

Dibandingkan model yang menyertakan pengukuran kompetensi, dokumentasi kegiatan di Desa Lemahmulya masih terbatas pada uraian proses dan respons umum peserta. Kekuatan kegiatan terletak pada keterlibatan pemerintah desa dan perguruan tinggi serta pemilihan sasaran yang dekat dengan pelayanan warga. Keterbatasannya adalah belum adanya data terukur untuk menilai perubahan pengetahuan atau kemampuan praktik. Oleh sebab itu, kegiatan ini lebih tepat diposisikan sebagai tahap pengenalan dan penguatan kesadaran, bukan sebagai bukti final keberhasilan transformasi layanan.



Gambar 3. Dokumentasi se usai kegiatan

Indikator hasil dan rencana tindak lanjut

Untuk menjaga ketepatan klaim, hasil yang tersedia dipisahkan antara temuan dokumenter dan dampak yang masih perlu diuji. Tabel 1 merangkum status bukti yang dapat dilaporkan dan indikator yang disarankan untuk pelaksanaan berikutnya.

Tabel 1. Bukti hasil kegiatan dan indikator evaluasi lanjutan

Aspek	Bukti dari dokumentasi	Indikator tindak lanjut yang disarankan
Pelaksanaan	Kegiatan berlangsung pada 7 Oktober 2026 di aula kantor desa.	Jadwal, durasi tiap sesi, dan daftar hadir terdokumentasi.
Penerimaan peserta	Peserta dilaporkan tertarik dan mengikuti kegiatan hingga selesai.	Persentase kehadiran dan hasil survei kepuasan.
Pengetahuan	Tidak tersedia skor pre-test dan post-test.	Perubahan skor pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi.
Keterampilan praktik	Dokumen menyebut pendekatan praktis, tetapi tidak memuat rubrik kompetensi.	Proporsi peserta yang mampu menyelesaikan tugas layanan digital secara mandiri.
Keberlanjutan	Dokumen merekomendasikan pendampingan berkelanjutan.	Jumlah sesi tindak lanjut dan penggunaan layanan digital setelah 1–3 bulan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk menjelaskan terlaksananya kegiatan dan respons umum, tetapi belum cukup untuk menghitung perubahan kompetensi. Pengukuran sederhana melalui pre-test dan post-test dapat menunjukkan perubahan pengetahuan, sedangkan demonstrasi tugas dapat menguji keterampilan aktual. Pemantauan setelah kegiatan diperlukan untuk mengetahui apakah

peserta menerapkan pengetahuan dalam pelayanan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengabdian berbasis evaluasi yang menilai bukan hanya keluaran kegiatan, tetapi juga perubahan yang dialami mitra (Wahid et al., 2024; World Bank, 2022).

Implikasi bagi penguatan layanan digital

Secara konseptual, transformasi layanan digital perlu dilihat sebagai perubahan tata kelola dan praktik organisasi, bukan sekadar adopsi aplikasi (Janowski, 2015; Vial, 2019). Dalam konteks desa, kajian tentang inovasi layanan publik dan desa cerdas menekankan bahwa teknologi perlu disertai kapasitas aparatur, tata kelola data, serta partisipasi warga (Addiansyah, 2024; de Fretes et al., 2026; Wahyiah, 2026). Analisis kebutuhan literasi digital aparatur juga relevan untuk layanan administrasi kependudukan (Pratama et al., 2025). Pada skala tata kelola yang lebih luas, indeks GovTech menyoroti pentingnya sistem pemerintahan, layanan publik daring, keterlibatan warga, dan faktor pendukung transformasi (World Bank, 2022a). Sementara itu, pendekatan CivicTech menekankan penggunaan perangkat digital untuk memperkuat transparansi, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat (Diakite & Wandaogo, 2024; World Bank, n.d.).

Implikasi utama kegiatan ini adalah perlunya menghubungkan literasi digital dengan alur kerja pelayanan. Aparatur RT/RW dapat didampingi menyusun daftar informasi yang aman dibagikan, tata cara meneruskan pengumuman resmi, prosedur pencatatan permintaan warga, serta mekanisme eskalasi ketika kebutuhan tidak dapat diselesaikan di tingkat RT/RW. Penggunaan kanal digital sebaiknya tetap menyediakan alternatif luring bagi warga yang memiliki keterbatasan perangkat, koneksi, atau keterampilan. Prinsip inklusi ini penting agar digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru bagi kelompok yang kurang terhubung (United Nations, 2024; van Deursen & van Dijk, 2014).

Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang tidak cukup diukur dari terselenggaranya sosialisasi atau antusiasme saat acara. Indikator yang lebih bermakna adalah kemampuan aparatur menjalankan tugas digital secara benar, konsistensi pemakaian, ketepatan informasi, perlindungan data warga, dan persepsi masyarakat terhadap kemudahan layanan. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pendamping melalui klinik konsultasi berkala, modul panduan ringkas, dan evaluasi bersama pemerintah desa.

KESIMPULAN

Sosialisasi Optimalisasi Layanan Digital Masyarakat di Desa Lemahmulya dilaksanakan pada 7 Oktober 2026 melalui kolaborasi pemerintah desa, STTI Sony Sugema Karawang, dan mahasiswa KKN dengan sasaran aparatur RT/RW. Dokumentasi menunjukkan kegiatan berjalan lancar dan peserta dilaporkan tertarik serta mengikuti kegiatan hingga selesai. Materi relevan dengan peran RT/RW dalam komunikasi, penyampaian informasi, dan dukungan administrasi masyarakat. Kegiatan ini dapat dipandang sebagai langkah awal untuk memperkuat kesadaran mengenai pemanfaatan layanan digital.

Tingkat keberhasilan dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau mutu layanan belum dapat diukur karena dokumen yang tersedia tidak mencantumkan jumlah peserta, instrumen evaluasi, skor awal-akhir, maupun tindak lanjut pascakegiatan. Karena itu, kegiatan berikutnya perlu melengkapi daftar hadir, pre-test dan post-test, observasi praktik, serta pemantauan penerapan selama satu sampai tiga bulan. Pendampingan juga perlu memasukkan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan pilihan

layanan luring agar digitalisasi tetap inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Lemahmulya, khususnya Sekretaris Desa Ibu Cucum, S.E., aparatur RT/RW, pimpinan STTI Sony Sugema Karawang, Ketua KKN Firman Maulana Yusuf, serta mahasiswa KKN yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiansyah, M. N. R. (2024). Smart village and public service innovation in endemic times: Learning from Mojowarno Village. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.75-88>
- de Fretes, J., Muhtar, M., & Rasyid, S. B. A. (2026). DigiDes dan reorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 1885–1898. <https://doi.org/10.63822/ma1s8x37>
- Diakite, M., & Wandaogo, A. (2024). Cross-country empirical analysis of GovTech platforms on citizen engagement. *World Bank Policy Research Working Paper*. <https://reproducibility.worldbank.org/catalog/180>
- Heryana, N., Mayasari, R., Yuda Irawan, A. S., & Nugraha, B. (2022). Improving digital literacy skills for Mekarbuana Village officials. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.35568/abdimas.v5i2.2520>
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), Article 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- OECD. (2020). Digital government index: 2019 results. OECD Public Governance Policy Papers, No. 3. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- OECD. (2024). 2023 OECD digital government index: Results and key findings. OECD Public Governance Policy Papers, No. 44. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en>
- Pratama, D., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Digitization of population administration services: Analysis of the need to improve digital literacy of village government apparatus. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.507>
- Rodiyah, I., & Bolanitan, Z. O. (2024). Enhancing digital literacy in village government for effective SID program implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1335>
- Saputra Utama, D. Y., Ningrum, M., & Siswanto, R. (2025). Strengthening community digital transformation in the new normal era. *Transactions on Informatics and Data Science*, 2(2). <https://doi.org/10.24090/tids.v2i2.16357>

- United Nations. (2024). United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2024>
- UNESCO Institute for Statistics. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. UNESCO. <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society*, 16(3), 507–526. <https://doi.org/10.1177/1461444813487959>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Wahid, N., Arni, A., Arfah, S. R., Khatimah, A. K., & Lutfiah, A. U. R. (2024). Digital literacy-based community empowerment in the public service information system in Makassar City. *Community Empowerment*, 9(1), 37–43. <https://doi.org/10.31603/ce.10138>
- Wahyiah, I. R. (2026). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa: Upaya menuju smart village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>
- World Bank. (2022a). GovTech maturity index: The state of public sector digital transformation. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi>
- World Bank. (2022b). Service upgrade: The GovTech approach to citizen-centered services. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/public-service-delivery>
- World Bank. (n.d.). CivicTech: Transparency, engagement, and collaboration for better governance. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/knowledge-and-innovation>